

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Belanja Daerah merupakan salah satu wujud dari amanah yang diemban pemerintah dan menjadi faktor utama dalam mengevaluasi kinerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Daerah sebagai suatu bagian organisasi pemerintah harus menyusun anggaran berbasis kinerja untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dalam Permendagri nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah" pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan berdasarkan asas terintegrasi, tanggungjawab, sedangkan dalam pengelolaannya meliputi beberapa aspek yaitu : dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Proses

pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan atau penyusunan anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD).

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan Daerah” Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan di setujui oleh Pemerintah Daerah, DPRD, dan ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah . Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah .

Belanja pada setiap satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja yaitu : belanja langsung, belanja tidak langsung, belanja tidak langsung merupakan belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan . Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan . dalam pelaksanaan belanja daerah program dan kegiatan harus sejalan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di daerah tersebut (Darise, 2008:139).

Penelitian terdahulu Oktora tentang “Analisis hubungan pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus atas belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah” Hasil uji kolerasi PAD dengan belanja modal menunjukkan terdapat hubungan yang kurang erat akibat rendahnya proporsi PAD dalam komposisi pendapatan Daerah. Hubungan antara DAU dengan belanja modal adalah sangat erat. Hal ini ditunjang oleh pemberian DAU dalam jumlah banyak sehingga memiliki proporsi yang dominan dalam pembiayaan belanja modal, DAK dengan belanja modal menunjukkan hubungan yang erat, realita ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan

pemerintah daerah terhadap dana transfer, khususnya dalam pengadaan aset tetap pada proyek tertentu yang urusannya diserahkan oleh Pemerintah Pusat.

Penelitian terdahulu Harianto 2007 tentang “Hubungan antara dana alokasi umum, Belanja Modal, Pendapatan asli Daerah dan pendapatan per kapita” hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal, Belanja Modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap pendapatan Per kapita dalam hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan perkapita, tetapi pertumbuhan yang terjadi masih kurang merata sehingga banyak ketimpangan atau jarak ekonomi antar daerah, dana alokasi umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui belanja modal.

Ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, terkadang banyak pengelolaan keuangan daerah seperti belanja daerah yang program dan kegiatannya tidak sejalan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Republik Indonesia yang dijabarkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) bahwa Kabupaten XX pada tahun 2017 memperoleh opini TMP (tidak memberikan pendapat), sehingga dari beberapa hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui faktor penyebab yang mempengaruhi Kabupaten xx memperoleh opini TMP (tidak memberikan pendapat).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah Tugas Akhir ini adalah bagaimana gambaran dokumen pelaksanaan anggaran 2.2.1 program dan kegiatan dengan di Kabupaten XX dengan melakukan Analisis terhadap DPA 2.2.1 Tahun 2017 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui gambaran dokumen pelaksanaan anggaran 2.2.1 program dan kegiatan di Kabupaten XX Tahun 2017.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, menambah wawasan, ilmu dan pengetahuan mengenai gambaran dokumen pelaksanaan anggaran 2.2.1 program dan kegiatan di Kabupaten XX Tahun 2017 .
2. Bagi akademisi, memberikan informasi data dan referensi kepustakaan mengenai gambaran dokumen pelaksanaan anggaran 2.2.1 program dan kegiatan di Kabupaten XX tahun 2017.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan pedoman untuk menyusun anggaran DPA tahun yang akan datang.